

Analisis Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus Pada Desa Oebelo, Kecamatan Amanuban Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan)- Kornelius Kelemur Kroon, SE., MM, Dr. Simon Sia Niha, SE., M.Si, Rosantri Leonard

ANALISIS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (Studi Kasus Pada Desa Oebelo, Kecamatan Amanuban Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan)

Kornelius Kelemur Kroon, SE., MM¹, Dr. Simon Sia Niha, SE., M.Si², Rosantri Leonard³

kornelius.kroon82@gmail.com

**Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis
Universitas Katolik Widya Mandira Kupang**

ABSTRACT

Village funds as a source of village finance are a blessing, which triggers progress and prosperity. The type of data used in this research is data according to the nature and types of data according to the source. The data analysis technique used in this research is descriptive statistical analysis and inferential statistical analysis. Based on the results of descriptive statistical research, it can be concluded that planning, implementation, administration, reporting, and accountability in village financial management are categorized as very good, measured by the achievement of indicators of the number of respondents. While the results of inferential statistical research show that the planning stage has a significant positive effect on village financial management, implementation has a significant positive effect on village financial management, administration and reporting have no significant effect on village financial management, while accountability has a significant positive effect on village financial management. The suggestion from this research is that the village government, in this case the treasurer and other village officials, needs to improve their understanding of the rules regarding village financial management.

Key words: Financial Management of the Village

ABSTRAK

Dana desa sebagai salah satu sumber keuangan desa menjadi berkat, yang memicu kemajuan dan kesejahteraan. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data menurut sifat dan jenis data menurut sumber. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis statistik deskriptif dan analisis statistik inferensial. Berdasarkan hasil penelitian statistik deskriptif dapat disimpulkan bahwa perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban pada pengelolaan keuangan desa dikategorikan sangat baik diukur melalui capaian indikator jumlah responden. Sedangkan hasil penelitian statistik inferensial menunjukkan bahwa tahapan perencanaan berpengaruh positif signifikan terhadap pengelolaan keuangan desa, pelaksanaan berpengaruh positif signifikan terhadap pengelolaan keuangan desa, penatausahaan dan pelaporan tidak berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan keuangan desa sedangkan pertanggungjawaban berpengaruh positif signifikan terhadap pengelolaan keuangan desa. Saran dari dalam penelitian ini adalah pemerintah desa dalam hal ini bendahara dan aparat desa lainnya, perlu meningkatkan lagi pemahaman terkait aturan-aturan tentang pengelolaan keuangan desa

Kata kunci: Pengelolaan Keuangan Desa

PENDAHULUAN

Desa merupakan unit terkecil disuatu negara namun memiliki peran penting untuk mencapai cita-cita suatu berbangsa dan bernegara. Undang-Undang No. 6 tahun 2014, Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk

mengatur dan mengurus urusan pemerintahan desa, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Wacana Equiliberium : Jurnal Pemikiran & Penelitian Ekonomi Vol. 09, No.02

P-ISSN : 2339-2185, E-ISSN : 2654-3869

APBDes merupakan kebijaksanaan keuangan pemerintah desa yang disusun berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan maksud agar penyusunan, pemantauan, pengendalian dan evaluasi anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) mudah dilakukan dan guna meningkatkan tuntutan masyarakat terhadap pemerintahan yang baik sehingga mendorong pemerintah pusat maupun daerah menerapkan akuntabilitas publik.

Salah satu aspek penting yang ikut serta dalam membangun desa adalah keuangan desa. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang "Pengelolaan Keuangan Desa", dijelaskan bahwa 1) Pendapatan desa adalah semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. 2) Belanja desa adalah semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. 3) Pembiayaan adalah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/ atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

Desa Oebelo, Kecamatan Amanuban Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan merupakan salah satu desa yang tertinggal. Keberadaan desa yang jauh di pedalaman Pulau Timor ini, menyebabkan banyak masyarakat yang memiliki tingkat pendidikan rata-rata tamatan SD dan SMP. Kondisi ini jelas menggambarkan kualitas sumber daya manusia pada Desa Oebelo bisa dikatakan masih rendah. Kualitas SDM yang masih rendah berdampak pada pengelolaan keuangan desa yang masih harus di tata dengan baik sesuai dengan peraturan pemerintah yang sudah ditetapkan dan

harus menjadi prioritas maupun pedoman dalam pengelolaan keuangannya.

Berdasarkan regulasi pemerintah desa mempunyai kewajiban untuk mengumumkan kepada masyarakat desa tentang keuangan desa dan program/kegiatan yang akan dilaksanakan. Observasi yang dilakukan peneliti diketahui bahwa selama ini Pemerintah Desa Oebelo tidak mengumumkan Rencana Penggunaan Keuangan Desa (APBDes) di awal tahun kepada masyarakat dan hanya dibahas bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa. Dalam tahapan penatausahaan di Desa Oebelo, Kecamatan Amanuban Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan proses penatausahaan telah menggunakan SISKEUDES. Namun, yang mengerjakan lebih banyak adalah sekertaris desa karena dalam hal ini bendahara desa kurang menguasai sistem tersebut. Selain itu, pada tahapan pertanggungjawaban APBDes, Pemerintah Desa Oebelo, tidak menyediakan sebuah media informasi untuk konsumsi masyarakat berupa sebuah papan pengumuman/banner/media- media cetak lainnya sebagai bentuk pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes kepada masyarakat desa.

Udik Jatmiko (2019) dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa faktor penghambat akuntabilitas pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan oleh pemerintah desa disebabkan oleh adanya target penggunaan dana desa yang belum teralisasi dengan baik, bahkan faktor sumber daya manusia yang berada dalam pemerintah desa tersebut yang tidak profesional dalam menyusun laporan keuangan desa. Sehingga, mempengaruhi ketepatan waktu pertanggungjawaban keuangan desa. Tepat waktu sangat diperlukan dalam penyampaian kepada pihak- pihak yang membutuhkan laporan untuk menghadapi masalah-masalah yang bersifat mendadak dan membutuhkan

pembuat laporan yang bisa diusahakan dibuat dan disampaikan.

Selain itu, Mirfan Zaeland (2016) juga dalam penelitiannya mengungkapkan beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya persoalan pengelolaan keuangan antara lain:

1. Kurangnya pembinaan dan pengawasan dari Pemerintah Kabupaten/Kota dalam hal ini kecamatan dan Desa Kurangnya peran serta masyarakat dalam mengawasi pembangunan desa.

2. Kurangnya pemahaman aparatur desa terhadap aturan pertanggungjawaban keuangan desa.

Lebih lanjut Mirfan Zaeland (2016) menyebutkan ada dua kelemahan yang akan timbul jika beberapa faktor tersebut tidak diselesaikan:

- a. Fungsi laporan pertanggungjawaban hanya sebagai syarat administrasi, bukan sebagai bukti akuntabilitas yang merupakan fungsi utamanya.

- b. Sikap permisif aparatur desa dalam menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan desa mengakibatkan laporan pertanggungjawaban yang dibuat tidak memperhatikan kebenaran pemerintah dan semakin mudah melakukan manipulasi.

Dengan berbagai aneka fenomena terkait pengelolaan keuangan desa, “Apakah pengelolaan keuangan desa sudah sesuai dengan Permendagri nomor 113 tahun 2014? Pertanyaan inilah yang menyebabkan peneliti untuk melakukan penelitian dengan judul: **“Analisis Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus Pada Desa Oebelo, Kecamatan Amanuban Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan)”**.

TINJAUAN TEORETIS

Konsep Desa

Pada dasarnya desa merupakan suatu wilayah yang menyatukan masyarakat secara universal dengan berbagai etnis yang berbeda dan memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus daerahnya sendiri. Menurut undang-undang pengertian Desa dapat didefinisikan sebagai berikut:

1. Permendagri No. 113 Tahun 2014

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Permendagri No. 20 Tahun 2018.

Desa adalah suatu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah dan yang memiliki wewenang untuk mengatur pemerintahan desa dan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat atau hak tradisional yang telah diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintahan Desa

PP No. 47 tahun 2015 perubahan atas PP No. 43 tahun 2014 menyebutkan bahwa pemerintah desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penyelenggaraan pemerintah desa dilakukan oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Pemerintah desa adalah organisasi pemerintah desa yang terdiri atas :

1. Unsur pimpinan, yaitu kepala desa. Kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.
2. Unsur pembantu kepala desa yang terdiri atas:
 - a. Sekretaris desa, yaitu unsur staf atau pelayanan yang diketuai oleh sekretaris desa.
 - b. Unsur pelaksanaan teknis, yaitu unsur pembantu kepala desa yang melaksanakan urusan teknis di lapangan seperti urusan keagamaan, dan lain-lain.
 - c. Unsur kewilayahan, yaitu pembantu kepala desa diwilayah kerjanya seperti kepala dusun (Nurcholis, 2011).

Keuangan Desa

Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintah desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut. Keuangan desa dikelola berdasarkan asas - asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran pengelolaan keuangan desa dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 januari sampai 31 desember (Permendagri No 113 Tahun 2014).

Anggaran pendapatan dan belanja desa/APBDes adalah rencana keuangan tahunan pemerintah desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa, dan ditetapkan dengan peraturan desa. Bendahara adalah perangkat desa yang ditunjuk oleh Kepala desa untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayarkan dan mempertanggungjawabkan keuangan desa

dalam rangka pelaksanaan APBDes (Permendagri Nomor 113 Tahun 2014).

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) anggaran berisi tentang seberapa besar belanja yang harus dikeluarkan dan bagaimana cara untuk memenuhi biaya atas program dan aktivitas yang telah direncanakan (Mahsun, 2015:65), sedangkan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) merupakan suatu bentuk peraturan desa yang memuat seluruh penerimaan dan pengeluaran desa dalam jangka waktu satu tahun anggaran pendapatan dan belanja desa juga dapat diartikan sebagai bentuk pertanggungjawaban pemegang manajemen desa atas seluruh informasi (Hasan 2015:3).

Elemen pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yaitu:

1. Pendapatan Desa terdiri atas kelompok:

- A. Pendapatan Asli Desa (PADesa).
- B. Pendapatan Transfer
- C. Pendapatan Lain-Lain

2. Belanja Desa

Belanja desa meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja desa dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan Desa.

3. Pembiayaan Desa

Pembiayaan desa meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pengelolaan Keuangan Desa

Pada suatu desa yang memegang kuasa atas pengelolaan keuangan desa

adalah kepala desa, kemudian yang melaksanakan pengelolaan keuangan desa adalah perangkat desa dengan berdasarkan keputusan dari kepala desa selaku penguasa atas pengelolaan keuangan desa. Pemerintah desa wajib mengelola keuangan desa secara transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertip dan disiplin.

Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut. Sedangkan yang dimaksud dengan pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Sehubungan dengan hal tersebut, maka dalam pengelolaan keuangan desa diperlukan suatu standar peraturan yang dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan sampai pada pertanggungjawaban keuangan desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang pedoman pengelolaan menyebutkan bahwa tahapan pengelolaan keuangan desa yaitu sebagai berikut:

1. Perencanaan

Perencanaan merupakan tahapan yang sangat penting dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan dan juga sebagai langkah awal dalam proses manajemen, karena dengan merencanakan aktivitas organisasi kedepan, maka segala sumber daya dalam organisasi difokuskan pada pencapaian tujuan organisasi. Terdapat tiga (3) indikator pada variabel perencanaan yakni rancangan perdes, APBDes, hasil evaluasi.

2. Pelaksanaan

Pelaksanaan dalam pengelolaan keuangan desa merupakan

implementasi atau eksekusi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa). Termasuk dalam pelaksanaan diantaranya adalah proses pengadaan barang dan jasa serta proses pembayaran. Terdapat enam (6) indikator pada variabel pelaksanaan yakni penerimaan, pengeluaran, pelaksanaan kegiatan, pengajuan surat permintaan pembayaran SPP, peraturan perundang-undangan, rencana anggaran biaya (RAB).

3. Penatausahaan

Penatausahaan merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis dalam bidang keuangan berdasarkan prinsip, standar, serta prosedur tertentu sehingga informasi aktual berkenaan dengan keuangan dapat segera diperoleh. Terdapat tiga (3) indikator pada variabel penatausahaan yakni aturan, tertib dan disiplin anggaran, pencatatan.

4. Pelaporan

Pelaporan merupakan kegiatan yang dilakukan untuk menyampaikan hal-hal yang berhubungan dengan hasil pekerjaan yang telah dilakukan selama satu periode tertentu sebagai bentuk pelaksanaan pertanggungjawaban atau tugas dan wewenang yang diberikan. Terdapat tiga (3) indikator pada variabel pelaporan yakni aturan, akuntabel, prosedur pelaporan.

5. Pertanggungjawaban

pertanggungjawaban adalah realisasi pelaksanaan APBDesa yang terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan akan disampaikan oleh kepala desa kepada Bupati/ Walikota setiap akhir tahun anggaran, dan juga memberikan informasi kepada masyarakat lewat media yang mudah diakses seperti papan pengumuman atau lainnya tentang laporan pelaksanaan realisasi anggaran.

Terdapat tiga (3) indikator pada variabel pertanggungjawaban yakni ketepatan penyampaian laporan, prosedur pertanggungjawaban, kejujuran dan keterbukaan informasi.

Asas-asas pengelolaan keuangan desa

Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Keuangan desa dikelola berdasarkan praktik-praktik pemerintahan yang baik. Asas-asas pengelolaan keuangan desa sebagaimana tertuang dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 yaitu transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Dalam penelitian kuantitatif menurut Sugiyono (2010;169) merupakan kegiatan setelah data dari seluruh responden atau sumber data lain terkumpul. Teknik analisis data kuantitatif dilakukan dengan model statistik deskriptif dan statistik inferensial. Analisis deskriptif bertujuan untuk memperoleh gambaran fenomena di lokasi penelitian serta mengidentifikasi karakteristik masing-masing variabel dalam bentuk frekuensi jawaban sampel dan presentasi serta melihat tanggapan sampel dalam bentuk capaian indikator (CI) (Ridwan, 2004:86) dengan rumusnya sebagai berikut:

Keterangan:

$$CI = \frac{JR}{SI} \times 100\%$$

CI = Capaian Indikator

JR = Jumlah Jawaban Responden

SI = Skor Ideal/ Skor terbesar (\sum responden x skor terbesar)

Teknik analisis yang digunakan untuk menginterpretasi dan menganalisis data, sesuai dengan model penelitian ini adalah SEM (*Structural Equation Modeling*) dengan PLS (*Partial Least*

Square) yang dioperasikan melalui program SmartPLS versi 3.0.

Parsial least square merupakan metode analisis yang dikembangkan sebagai alternatif untuk situasi dimana teorinya lemah dan datanya yang lemah seperti jumlah sampel yang kecil, adanya masalah normalitas data atau indikator yang tersedia tidak memenuhi model pengukuran refleksi, tetapi normatif.

PLS sebagai "*Soft modeling*" merupakan metode analisis yang *powerfull* karena dapat diterapkan disemua skala data, dan tidak membutuhkan banyak asumsi dan ukuran sampel tidak harus besar. PLS selain digunakan sebagai konfirmasi teori juga dapat digunakan untuk membangun hubungan yang belum ada landasan teorinya atau untuk pengujian proporsinya (Wiyono, 2011: 395).

Dalam memperoleh data yang dibutuhkan guna melengkapi proses penelitian ini, penulis melakukan serangkaian kegiatan yang bersumber dari wawancara dengan melakukan tanya jawab yang berhubungan dengan objek penelitian di kantor Desa Oebelo, Kecamatan Amanuban Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan. Selain itu, dokumentasi juga merupakan metode pengumpulan data dengan cara melihat catatan-catatan dan mengumpulkan dokumen pada lokasi penelitian terkait dengan masalah penelitian. Seperti, data laporan realisasi APBDes pemerintah desa tahun anggaran 2018-2019. Peneliti juga menyebarkan kuisisioner sebagai salah satu metode pengumpulan data. Kuisisioner digunakan untuk memperoleh data primer yang relevan dengan objek penelitian yang berupa serangkaian pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab (Sugyono, 2004:199). Kuisisioner diberikan kepada responden yaitu, perwakilan tokoh masyarakat dan pemerintah desa. Dengan setiap item pertanyaan menggunakan skala Likert.

Yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah aparat desa dan sebagian tokoh masyarakat pada Desa Oebelo yang berjumlah 40 orang. Sedangkan untuk sampel dalam penelitian ini digunakan adalah metode sampel total atau sensus, semua anggota populasi menjadi sampel penelitian. Responden dalam penelitian ini terdiri dari Aparat desa, kepala dusun, BPD, dan sebagian perwakilan tokoh masyarakat yang terdiri dari RT, RW, Dusun, dan tokoh masyarakat itu sendiri.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Karakteristik Responden

Karakteristik responden yang dimaksud dalam penelitian ini adalah keadaan atau identitas yang melekat pada responden. Karakteristik responden dalam penelitian ini dilihat dari berbagai aspek, di antaranya jenis kelamin, usia, pendidikan terakhir, dan jabatan. Selengkapnya ditampilkan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 1

Data Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Uraian	Jumlah	Presentase (%)
1	Pria	32	80
2	Wanita	8	20
Total		40	100

Berdasarkan tabel 1 dapat kita lihat bahwa gambaran responden berdasarkan jenis kelamin yakni kaum pria berjumlah 32 orang dengan presentase 80% dan kaum wanita yakni 8 orang dengan presentase sebesar 20%. Hal ini menunjukkan bahwa aparat desa maupun perwakilan tokoh masyarakat pada Desa Oebelo, Kecamatan Amanuban Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan, yang dijadikan sampel dalam penelitian ini didominasi oleh kaum pria.

Tabel 2

Data Responden Berdasarkan Usia

No.	Uraian	Jumlah	Presentase (%)
1	23-35	8	20
2	36-45	15	38
3	46-55	10	25
4	56-65	6	15
5	66-70	1	2
Total		40	100

Berdasarkan tabel 2 dapat dilihat bahwa jumlah responden terbanyak berusia 36-45 yakni 15 orang dengan presentase sebesar 38% dan jumlah responden terendah ada pada usia dibawah 66-70 tahun yakni 1 orang dengan presentase sebesar 2%. Hal ini menunjukkan bahwa responden yang dipilih dalam penelitian ini masih sangat produktif.

Tabel 3

Data Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir

No.	Uraian	Jumlah	Presentase (%)
1	SD	5	12
2	SMP	15	38
3	SMA	16	40
4	S1	4	10
Total		40	100

Berdasarkan tabel diatas 3 dapat dilihat bahwa gambaran responden berdasarkan jenjang pendidikan terakhir aparat desa maupun perwakilan tokoh masyarakat yang ada pada Desa Oebelo mayoritas lulusan SMA yakni 16 orang dengan presentase sebesar 40% dan jumlah responden paling rendah jenjang pendidikan terakhirnya S1 yakni 4 orang dengan presentase 10%. Hal ini diketahui bahwa tingkat pengelolaan keuangan Desa Oebelo, Kecamatan Amanuban Selatan, Kecamatan Amanuban Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan didominasi oleh tingkat pendidikan SMA.

Tabel 4

Data Responden Berdasarkan Jabatan

No	Uraian	Jumlah	Presentase (%)
----	--------	--------	----------------

1	Kepala Desa	1	3
2	Sekretaris	1	3
3	Bendahara	1	2
4	Badan Permusyawaratan Desa (BPD)	5	12
5	Dusun	4	10
6	Rukun warga (RW)	10	25
7	Rukun Tetangga (RT)	10	25
8	Tokoh Masyarakat	8	20
Total		40	100

Berdasarkan tabel 4 diatas dilihat bahwa gambaran responden berdasarkan jabatan mulai dari Kepala desa sampai pada tokoh masyarakat dengan rincian sebagai berikut: kepala desa, sekretaris, bendahara, dengan jumlah responden masing-masing berjumlah 1 orang dengan presentase sebesar 3%, badan permusyawaratan desa (BPD) yakni berjumlah 5 orang dengan presentase 12%, dusun yakni berjumlah 4 orang dengan presentase 10% , rukun warga (RW) yakni berjumlah 10 orang dengan presentase 25% , rukun tetangga (RT) yakni berjumlah 10 orang dengan presentase 25% , dan tokoh Masyarakat yakni berjumlah 8 dengan presentase 20%.

Analisis Statistik Deskriptif

Metode deskriptif merupakan metode penelitian yang digunakan untuk menggambarkan masalah yang terjadi pada masa sekarang atau yang sedang berlangsung. Bertujuan untuk mendeskripsikan hal-hal yang terjadi mestinya pada saat penelitian dilakukan.

Penelitian ini merupakan penelitian yang mendeskripsikan fenomena apa saja yang dapat mempengaruhi pengelolaan keuangan desa pada Desa Oebelo, Kecamatan Amanuban Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan. Berdasarkan

penjelasan diatas dapat dilihat pada tabel berikut:

a. Pengelolaan keuangan desa (Y)

Tabel 5
Capaian Indikator Variabel
Pengelolaan Keuangan Desa (Y)

No	Indikator	Total Jawaban	SI	CI	Kategori
1	Penyusunan anggaran desa	560	465	95,54	Sangat Baik
2	Alokasi anggaran desa	560	461	94,82	Sangat Baik
3	Transparansi	560	458	94,29	Sangat Baik
4	Pengawasan	560	458	94,29	Sangat Baik
Total dan Rata-rata (Jumlah Jawaban)		2240	1842	94,25	Sangat Baik

Variabel pengelolaan keuangan desa diukur menggunakan instrumen dengan 8 pernyataan 4 indikator. Berdasarkan pada tabel 5 diatas dapat dilihat bahwa jumlah jawaban dari 40 responden tentang pengelolaan keuangan desa 560 dengan total skor ideal (SI) 680 sehingga capaian indikator (CI) dari pengelolaan keuangan desa adalah sebesar 82,35% dan dikategorikan sangat baik. Hal ini menunjukkan bahwa penilaian terhadap pengelolaan keuangan desa dalam bentuk frekuensi jawaban responden dalam capaian indikator sangat baik.

b. Perencanaan keuangan desa (X1)

Tabel 6
Capaian Indikator Variabel
Perencanaan keuangan Desa (X1)

No	Indikator	Total Jawaban	SI	CI	Kategori
1	Menyusun anggaran desa	438	348	93,15	Sangat Baik
2	Alokasi	438	343	91,78	Sangat Baik
3	Transparansi	438	343	91,78	Sangat Baik
Total dan Rata-rata (Jumlah Jawaban)		1752	1378	91,25	Sangat Baik

Variabel perencanaan keuangan desa diukur menggunakan instrumen dengan 8 pernyataan 3 indikator. Berdasarkan pada tabel 6 diatas dapat dilihat bahwa jumlah jawaban dari 40 responden tentang perencanaan keuangan desa 438 dengan total skor ideal (SI) 520 sehingga capaian indikator (CI) dari

perencanaan keuangan desa adalah sebesar 84,23% dan dikategorikan sangat baik. Hal ini menunjukkan bahwa penilaian terhadap perencanaan keuangan desa dalam bentuk frekuensi jawaban responden dalam capaian indikator sangat baik.

c. Pelaksanaan keuangan desa (X2)

Tabel 7
Capaian Indikator Variabel Pelaksanaan keuangan Desa (X2)

No	Indikator	Jumlah Pernyataan	JK	SI	CI	Kategori
1	Perencanaan desa	920	147	40	70,70	Baik
2	Pengelolaan desa	920	147	40	81,44	Sangat Baik
3	Pelaksanaan kegiatan	920	147	20	80,22	Sangat Baik
4	Pelaksanaan SWP	920	146	20	80,77	Baik
5	Pelaksanaan penitidngan (auditing)	920	148	20	80,77	Sangat Baik
6	Kelembagaan (KMP)	920	171	20	88,15	Sangat Baik
Total dan Rata-rata jawaban Responden			100	1080	85,18	Sangat Baik

Variabel pelaksanaan keuangan desa diukur menggunakan instrumen dengan 15 pernyataan 6 indikator. Berdasarkan pada tabel 7 diatas dapat dilihat bahwa jumlah jawaban dari 40 responden tentang pelaksanaan keuangan desa 920 dengan total skor ideal (SI) 1080 sehingga capaian indikator (CI) dari pelaksanaan keuangan desa adalah sebesar 85,18% dan dikategorikan sangat baik. Hal ini menunjukkan bahwa penilaian terhadap pelaksanaan keuangan desa dalam bentuk frekuensi jawaban responden dalam capaian indikator sangat baik.

d. Penatausahaan keuangan desa (X3)

Tabel 8
Capaian Indikator Variabel Penatausahaan Keuangan Desa (X3)

No	Indikator	Jumlah Pernyataan	JK	SI	CI	Kategori
1	Nilai pertanggungjawaban	400	75	100	56,25	Sangat Baik
2	Kejelasan dalam anggaran	400	71	100	55,50	Sangat Baik
3	penyerta	400	73	100	57	Sangat Baik
Total dan Rata-rata jawaban Responden			111	400	57,08	Sangat Baik

Variabel penatausahaan keuangan desa diukur menggunakan instrumen

dengan 7 pernyataan 3 indikator. Berdasarkan pada tabel 5.8 diatas dapat dilihat bahwa jumlah jawaban dari 40 responden tentang penatausahaan keuangan desa 418 dengan total skor ideal (SI) 480 sehingga capaian indikator (CI) dari penatausahaan keuangan desa adalah sebesar 87,08% dan dikategorikan sangat baik. Hal ini menunjukkan bahwa penilaian terhadap penatausahaan keuangan desa dalam bentuk frekuensi jawaban responden dalam capaian indikator sangat baik.

e. Pelaporan keuangan desa (X4)

Tabel 9
Capaian Indikator Variabel Pelaporan Keuangan Desa (X4)

No	Indikator	Jumlah Pernyataan	JK	SI	CI	Kategori
1	Informasi publikasi	429	73	100	65,25	Baik
2	Kejelasan	429	74	100	65,48	Sangat Baik
3	Penerapan pelaporan	429	150	175	85,43	Sangat Baik
Total dan Rata-rata jawaban Responden			127	429	82,50	Sangat Baik

Variabel pelaporan keuangan desa diukur menggunakan instrumen dengan 6 pernyataan 3 indikator. Berdasarkan pada tabel 5.9 diatas dapat dilihat bahwa jumlah jawaban dari 40 responden tentang pelaporan keuangan desa 429 dengan total skor ideal (SI) 520 sehingga capaian indikator (CI) dari pelaporan keuangan desa adalah sebesar 82,5% dan dikategorikan sangat baik. Hal ini menunjukkan bahwa penilaian terhadap pelaporan keuangan desa dalam bentuk frekuensi jawaban responden dalam capaian indikator sangat baik.

f. Pertanggungjawaban keuangan desa (X5)

Tabel 10
Capaian Indikator Variabel Pertanggungjawaban Keuangan Desa (X5)

No	Indikator	Jumlah Jawaban	CI	SI	CI	Kategori
1	Pengelolaan keuangan desa	381	113	149	79,16%	Baik
2	Perencanaan keuangan desa	381	129	141	79,16%	Baik
3	Pelaksanaan keuangan desa	381	113	149	79,16%	Baik
Total dan Skor Total Ideal		1143	355	439	79,16%	Baik

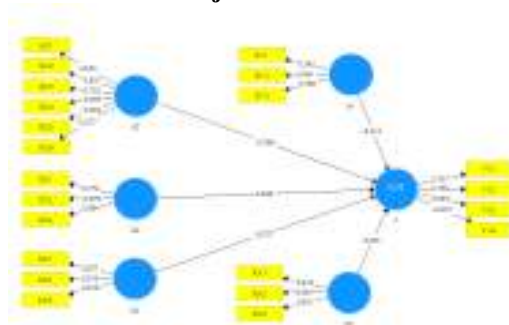
Variabel pertanggungjawaban keuangan desa diukur menggunakan instrumen dengan 7 pernyataan 3 indikator. Berdasarkan pada tabel 5.10 diatas dapat dilihat bahwa jumlah jawaban dari 40 responden tentang pertanggungjawaban keuangan desa 380 dengan total skor ideal (SI) 480 sehingga capaian indikator (CI) dari pertanggungjawaban keuangan desa adalah sebesar 79,16% dan dikategorikan baik. Hal ini menunjukkan bahwa penilaian terhadap pertanggungjawaban keuangan desa dalam bentuk frekuensi jawaban responden dalam capaian indikator baik.

Analisis Statistik Inferensial

Dalam penelitian ini, alat yang digunakan untuk melakukan analisis inferensial adalah SEM (*Structural Equation Modeling*) dengan PLS (*Partial Least Square*), yang dioperasikan melalui program SmartPLS versi 3.0.

Merancang Model Pengukuran (Outer Model)

Hasil Uji Outer Model



Uji yang dilakukan pada outer model meliputi: *Convergent Validity*, *Average variance Extracted (AVE)*, *Composite Reliability* dan *Cobrach's alpha*. Berdasarkan gambar diatas, hasil uji dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. *Convergent Validity*

Nilai *Convergent Validity* adalah: nilai *loading factor* pada variabel laten dengan indikator- indikatornya. Nilai ini untuk mengetahui validitas tiap indikator yang digunakan dalam penelitian dengan ketentuan melebihi angka 0,7

Tabel 11
Convergent Validity

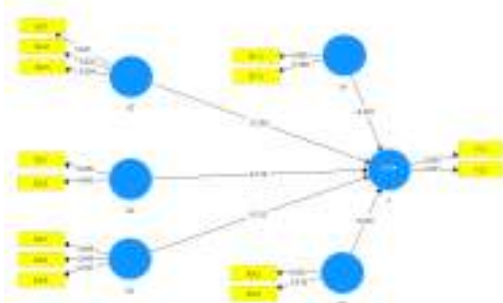
No	Variabel	Indikator	Nilai Outer Loading
1	Pengelolaan keuangan desa	1. Prosedur pengelolaan keuangan desa	0,737
		2. Aturan pengelolaan keuangan desa	0,759
		3. Transparansi	0,665
		4. Partisipasi masyarakat	-0,437
2	Perencanaan keuangan desa	1. Rancangan peraturan desa	0,542
		2. APBDes	0,841
		3. Hasil evaluasi	0,700
3	Pelaksanaan Keuangan desa	1. Penerimaan desa	0,853
		2. Pengeluaran desa	0,837
		3. Pelaksanaan kegiatan	0,753
		4. Pengajuan SPP	0,003
		5. Peraturan perundang-undangan	-0,054
		6. Rencana anggaran biaya (RAB)	-0,277

Penatausahaan	1. Aturan penatausahaan	0,776
---------------	-------------------------	-------

	keuangan desa	2. Tertib dan disiplin anggaran	0,459
		3. Pencatatan	0,884
5	Pelaporan keuangan desa	1. Aturan pelaporan	0,877
		2. Akuntabel	0,810
		3. Prosedur pelaporan	0,816
6	Pertanggungjawaban keuangan desa	1. Ketepatan penyampaian laporan	0,673
		2. Kejujuran dan keterbukaan informasi	0,835
		3. Prosedur pertanggungjawaban	0,921

Dari hasil olah data, terlihat bahwa terdapat 8 (delapan) indikator yang memperoleh nilai lebih kecil dari 0,7 yaitu indikator Transparansi, Partisipasi masyarakat, Rancangan peraturan desa, Pengajuan SPP, Peraturan perundang-undangan, Rencana anggaran biaya (RAB), Tertib dan disiplin anggaran, Ketepatan penyampaian laporan, sehingga indikator-indikator tersebut akan dihilangkan atau tidak diikutsertakan dalam penelitian ini. Selanjutnya dilakukan kembali uji outer model kedua. Berikut adalah gambar Hasil uji outer model kedua :

Hasil Uji Outer Model Kedua



Hasil uji tersebut akan ditampilkan dalam bentuk tabel untuk

menunjukkan nilai outer loading tiap indikator.

Tabel 5.12
Convergent Discriminant Validity

No.	Variabel	Indikator	Nilai Outer Loading
1	Pengelolaan keuangan desa	1. Prosedur pengelolaan keuangan desa	0,863
		2. Aturan pengelolaan keuangan desa	0,901
2	Perencanaan keuangan desa	1. APBDes	0,865
		2. Hasil evaluasi	0,778
3	Pelaksanaan Keuangan desa	3. Penerimaan desa	0,821
		4. Pengeluaran desa	0,824
		5. Pelaksanaan kegiatan	0,834
4	Penatausahaan keuangan desa	1. Aturan penatausahaan	0,852
		2. Pencatatan	0,862
5	Pelaporan keuangan desa	1. Aturan pelaporan	0,869
		2. Akuntabel	0,849
		3. Prosedur pelaporan	0,791
6	Pertanggungjawaban keuangan desa	1. Kejujuran dan keterbukaan informasi	0,852
		2. Prosedur pertanggungjawaban	0,916

Pada uji outer model kedua, terlihat bahwa seluruh indikator memperoleh nilai *outer loading* diatas 0,7. Dengan hasil seperti ini maka seluruh indikator dalam penelitian ini layak untuk digunakan.

2. Average Variance Extracted (AVE)

Average Variance Extracted (AVE) adalah *cross loading factor* untuk mengetahui apakah variabel laten memiliki diskriminan yang

memadai, yaitu dengan cara membandingkan korelasi indikator dengan variabel latennya harus lebih besar dibandingkan dengan korelasi antar indikator dengan variabel lain. Jika korelasi indikator dengan variabel latennya memiliki nilai yang lebih tinggi dibandingkan dengan korelasi indikator tersebut terhadap variabel laten lain maka dapat dikatakan variabel laten tersebut memiliki validitas yang tinggi. Nilai AVE direkomendasikan >0,5. Berikut nilai AVE dari tiap variabel:

Tabel 12
Nilai Average Variance Extracted

No	Variabel	Nilai AVE
1	Pengelolaan keuangan desa	0,684
2	Perencanaan	0,683
3	Pelaksanaan	0,734
4	Penatausahaan	0,700
5	Pelaporan	0,783
6	Pertanggungjawaban	0,779

Dari tabel diatas, dapat diketahui bahwa nilai *Average Variance Extracted (AVE)* dari tiap variabel berada pada nilai diatas 0,50. Sehingga, masing- masing kosntruk tidak memiliki permasalahan dan layak digunakan.

3. *Composite Reliability*

Selain uji *Convergent Validity*, untuk menguji kosntruk yang diteliti maka dilakukan juga uji *Composite Reliability* untuk mengukur *internal consistency* dan nilainya harus diatas 0,60. Hasil outer PLS untuk nilai *Composite Reliability* dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 13
Nilai Composite Reliability

No	Variabel	Nilai Composite Reliability

1	Pengelolaan keuangan desa	0,812
2	Perencanaan	0,866
3	Pelaksanaan	0,847
4	Penatausahaan	0,875
5	Pelaporan	0,878
6	Pertanggungjawaban	0,876

Berdasarkan hasil uji yang terlihat pada data tabel diatas, menunjukkan bahwa nilai *Composite Reliability* semua kosntruk berada diatas 0,60 dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa semua kosntruk memiliki reliabilitas yang baik sesuai dengan nilai minimum yang di syaratkan.

4. *Cronbach's Alpha*

Uji *Cronbach's Alpha* diketahui untuk mengetahui reliabilitas tiap variabel. Dalam uji *Cronbach's Alpha*, syarat reliabilitas adalah diatas nilai 0,50. Berikut hasil uji *Cronbach's Alpha*, dari tiap variabel.

Tabel 14
Nilai Cronbach Alpha

No	Variabel	Nilai Cronbach's Alpha
1	Pengelolaan keuangan desa	0,542
2	Perencanaan	0,787
3	Pelaksanaan	0,638
4	Penatausahaan	0,791
5	Pelaporan	0,727
6	Pertanggungjawaban	0,717

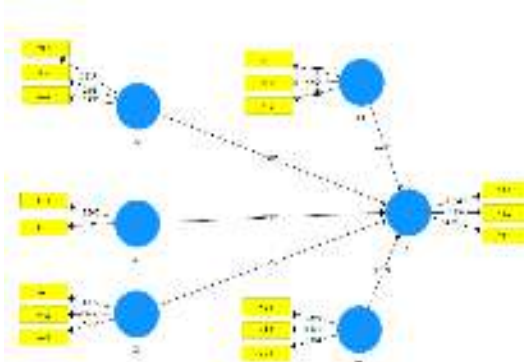
Berdasarkan hasil uji *Cronbach's Alpha* pada tabel diatas, nilai yang diperoleh tiap variabel berada diatas nilai 0,50. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa semua kosntruk memiliki nilai *Cronbach's Alpha* yang baik dan memenuhi syarat.

Merancang Model Struktural (Inner Model)

Pengujian inner model adalah untuk menggambar hubungan antar variabel laten berdasarkan pada *Substantive Theory*. Pengujian ini menggunakan uji *Bootstrapping* pada SmartPLS 3.3.3. Berikut hasil uji inner model dapat dilihat pada gambar berikut :

	Original Sample (R²)	Mean Square Error (Q²)	Standard Deviation (SD)	Standard Error (SE)	P
R² = Y	0,513	0,395	0,179	2,034	0,022
Q² = Y	-0,356	-0,941	0,373	2,925	0,003
SD = Y	0,302	0,000	0,777	0,303	0,923
SE = Y	-0,227	-0,225	0,361	1,571	0,020
Q² = Y	0,302	0,000	0,777	0,303	0,923

Hasil Uji Inner Model



Selanjutnya, yaitu tahapan dalam pengujian model struktural, adalah *R-square* dan *Adjusted R-Square* dan Uji *path Coefficient*. Berikut gambar hasil uji dari kedua tahapan tersebut.

a) Uji R-Square

Tabel 5.16
Nilai R-Square

	R Square	R Square Adjusted
Y	0.513	0.441

Berdasarkan hasil tabel 5.16 nilai *R-Square* dari variabel laten dependen pengelolaan keuangan desa adalah: 0,513. Nilai tersebut dapat diartikan bahwa variabilitas konstruk dalam penelitian adalah sebesar 51,3% sementara 48,7% lainnya dijelaskan oleh factor lain diluar penelitian ini.

b) Uji path Coefficient

Tabel 5.17
Nilai path Coefficients

Dalam PLS pengujian dilakukan secara statistik setiap hubungan yang dihipotesiskan dilakukan dengan menggunakan simulasi. Dalam hal ini dilakukan metode *bootstrap* terhadap sampel. Pengujian dengan *bootstrap* dimaksudkan untuk meminimalkan masalah ketidaknormalan data penelitian. Hasil pengujian dengan *bootstrapping* dari analisis PLS adalah sebagai berikut:

Pengujian Hipotesis 1

(Gambaran Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, Pertanggungjawaban Serta Pengelolaan keuangan Desa)

Hasil pengujian hipotesis pertama menunjukkan bahwa perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban serta pengelolaan keuangan desa telah dilaksanakan dengan sangat baik.

Pengujian Hipotesis 2

(Pengaruh Perencanaan (X1) Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa (Y))

Pengujian hipotesis 2 diperoleh nilai koefisien untuk variabel perencanaan terhadap pengelolaan keuangan desa sebesar -0.356 dengan nilai *t-statistik* sebesar 2.034. Dari hasil ini dinyatakan *t-statistik* signifikan. Karena $>1,96$ dengan *p-value* $<0,05$ sehingga hipotesis kedua diterima. Hal ini menunjukkan bahwa perencanaan memiliki pengaruh positif signifikan terhadap pengelolaan keuangan desa. pengujian variabel perencanaan terhadap pengelolaan keuangan desa menunjukkan bahwa semakin baik perencanaan yang ada pada desa maka akan meningkatkan pengelolaan keuangan desa yang ada didesa itu sendiri. Karena

Perencanaan merupakan proses tahapan awal dalam pengelolaan keuangan desa maupun penentuan sesuatu yang ingin dicapai dimasa uang akan datang. Serta menetapkan tahapan-tahapan yang perlu untuk mencapainya. (Guasmin 2018:4)

Pengujian Hipotesis 3 (Pengaruh pelaksanaan (X2) Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa (Y))

Pengujian hipotesis 3 diperoleh nilai koefisien untuk variabel pelaksanaan terhadap pengelolaan keuangan desa sebesar -0.319 dengan nilai *t-statistik* sebesar 2.025. Dari hasil ini dinyatakan *t-statistik* signifikan. Karena $>1,96$ dengan *p-value* $<0,05$ sehingga hipotesis ketiga diterima. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan memiliki pengaruh positif signifikan terhadap pengelolaan keuangan desa. berdasarkan teori pelaksanaan merupakan tahapan lanjutan setelah perencanaan dalam pengelolaan keuangan desa yang berkaitan dengan proses realisasi anggaran. (Guasmin 2018:5)

Pengujian Hipotesis 4 (Pengaruh Penatausahaan (X3) Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa (Y))

Pengujian hipotesis 4 diperoleh nilai koefisien untuk variabel penatausahaan terhadap pengelolaan keuangan desa sebesar 0.048 dengan nilai *t-statistik* sebesar 0.352. Dari hasil ini dinyatakan *t-statistik* tidak signifikan. Karena $<1,96$ dengan *p-value* $>0,05$ sehingga hipotesis ke-empat ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa penatausahaan tidak memiliki pengaruh positif signifikan terhadap pengelolaan keuangan desa. penatausahaan tidak terlalu berpengaruh karena tahapan ini merupakan tahapan pendukung dalam pengelolaan keuangan desa yang dimana tahapan ini dijalankan oleh bendahara desa itu sendiri tidak harus melibatkan masyarakat dalam pengelolaannya.

Pengujian Hipotesis 5 (Pengaruh pelaporan (X4) Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa (Y))

Pengujian hipotesis 5 diperoleh nilai koefisien untuk variabel pelaporan terhadap pengelolaan keuangan desa sebesar -0.227 dengan nilai *t-statistik* sebesar 1.252. Dari hasil ini dinyatakan *t-statistik* tidak signifikan. Karena $<1,96$ dengan *p-value* $>0,05$ sehingga hipotesis ke-lima ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa pelaporan tidak memiliki pengaruh positif signifikan terhadap pengelolaan keuangan desa. tahapan pelaporan merupakan tahapan setelah penatausahaan yang dimana pada tahapan ini tidak terlalu mempengaruhi pembangunan desa dan masyarakat dan hanya melibatkan perangkat desa itu sendiri atau bendahara sehingga tidak berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan.

Pengujian Hipotesis 6 (Pengaruh Pertanggungjawaban (X5) Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa (Y))

Pengujian hipotesis 6 diperoleh nilai koefisien untuk variabel pertanggungjawaban terhadap pengelolaan keuangan desa sebesar 0.478 dengan nilai *t-statistik* sebesar 3.239. Dari hasil ini dinyatakan *t-statistik* signifikan. Karena $>1,96$ dengan *p-value* $<0,05$ sehingga hipotesis ke-enam diterima. Hal ini menunjukkan bahwa pertanggungjawaban memiliki pengaruh positif signifikan terhadap pengelolaan keuangan desa. pengujian variabel pertanggungjawaban terhadap pengelolaan keuangan desa. hasil ini sesuai dengan teori *stewardship*, yaitu pemerintah desa memberikan informasi kepada masyarakat terkait laporan realisasi pelaksanaan maupun laporan realisasi pertanggungjawaban keuangan desa yang merupakan bukti atau keterangan mengenai pengelolaan keuangan desa setelah pembangunan dilaksanakan. (Bashir, 2014)

SIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan pada hasil pengujian dan pembahasan yang penulis sajikan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Hasil analisis statistik deskriptif menggambarkan bahwa variabel pengelolaan keuangan desa, perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan berada dalam standar keputusan "Sangat Baik" sedangkan pada variabel pertanggungjawaban berada dalam standar keputusan "Baik". hal ini menunjukkan bahwa hipotesa pertama diterima.
2. Hasil analisis statistik inferensial menunjukkan bahwa :
 - a. Hipotesis 2: pengaruh perencanaan (X1) terhadap pengelolaan keuangan desa (Y) dengan nilai koefisien untuk variabel perencanaan terhadap pengelolaan keuangan desa sebesar -0.356 dengan nilai *t-statistik* sebesar 2.034. Dari hasil ini dinyatakan *t-statistik* signifikan. Karena $>1,96$ dengan $p\text{-value} <0,05$ sehingga hipotesis kedua diterima. Hal ini menunjukkan bahwa perencanaan memiliki pengaruh positif signifikan terhadap pengelolaan keuangan desa.
 - b. Hipotesis 3: pengaruh pelaksanaan (X2) terhadap pengelolaan keuangan desa (Y) dengan nilai koefisien untuk variabel pelaksanaan terhadap pengelolaan keuangan desa sebesar -0.319 dengan nilai *t-statistik* sebesar 2.025. Dari hasil ini dinyatakan *t-statistik* signifikan. Karena $>1,96$ dengan $p\text{-value} <0,05$ sehingga hipotesis ketiga diterima. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan

memiliki pengaruh positif signifikan terhadap pengelolaan keuangan desa.

- c. Hipotesis 4: pengaruh penatausahaan (X3) terhadap pengelolaan keuangan desa (Y) dengan nilai koefisien untuk variabel penatausahaan terhadap pengelolaan keuangan desa sebesar 0.048 dengan nilai *t-statistik* sebesar 0.352. Dari hasil ini dinyatakan *t-statistik* tidak signifikan. Karena $<1,96$ dengan $p\text{-value} >0,05$ sehingga hipotesis ke-empat ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa penatausahaan tidak memiliki pengaruh positif signifikan terhadap pengelolaan keuangan desa.
- d. Hipotesis 5: pengaruh pelaporan (X4) terhadap pengelolaan keuangan desa (Y) dengan nilai koefisien untuk variabel pelaporan terhadap pengelolaan keuangan desa sebesar -0.227 dengan nilai *t-statistik* sebesar 1.252. Dari hasil ini dinyatakan *t-statistik* tidak signifikan. Karena $<1,96$ dengan $p\text{-value} >0,05$ sehingga hipotesis ke-lima ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa pelaporan tidak memiliki pengaruh positif signifikan terhadap pengelolaan keuangan desa.
- e. Hipotesis 6: pengaruh pertanggungjawaban terhadap pengelolaan keuangan desa (Y) dengan nilai koefisien untuk variabel pertanggungjawaban terhadap pengelolaan keuangan desa sebesar 0.478 dengan nilai *t-statistik* sebesar 3.239. Dari hasil ini dinyatakan *t-statistik* signifikan. Karena $>1,96$ dengan $p\text{-value} <0,05$ sehingga hipotesis ke-enam diterima. Hal ini menunjukkan bahwa

pertanggungjawaban memiliki pengaruh positif signifikan terhadap pengelolaan keuangan desa.

SARAN

1. Kepada pemerintah diharapkan perencanaan program penggunaan keuangan desa yang dilakukan secara terbuka dengan melibatkan masyarakat, perangkat desa dan tokoh masyarakat terus memperhatikan kebutuhan sesuai skala prioritas masyarakat.
2. Pemerintah desa juga perlu memperhatikan lagi tahapan pengelolaan keuangan desa yang dianggap belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ditentukan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdilla dan Jogiyanto, Wily. 2015. *Konsep Dan APLIKASI PLS untuk Penelitian Empiris*. Yogyakarta: BPFE.
- Agus widarjono. 2015. *Analisis Multivariant Terapan Dengan Program SPSS, AMOS, dan SMARTPLS* : Edisi kedua, Yogyakarta: UPP STIM YPKN.
- Andreas wijaya. 2019. *Metode Penelitian Menggunakan Smart PLS 03*. Yogyakarta: Innosain.
- Arikunto. 2013. *Prosedur Penelitian, suatu praktek*. Jakarta: Bina Aksara.
- Atmaja Aji. 2016. *Analisis Pengelolaan Keuangan Dan Kekayaan Desa (Studi Kasus Di Desa Pelesungan Kecamatan Gondongrejoo Kabupaten Karanganyer)*. Naskah Publikasi. Universitas Muhammadiyah; Surakarta.
- Bambang Utoyo. 2010. *Optimalisasi Pembangunan Desa Melalui Pelatihan Perencanaan Pembangunan Desa*. Skripsi. Universitas Lampung; Lampung.
- Dewi Rasmi. 2018. *Analisis Pengelolaan Keuangan Pertanggungjawaban Keuangan Desa Pada Desa Setani Kabupaten Jayapura*. Skripsi. Universitas Muhammadiyah; Palembang.
- Ghozali dan Laten. 2006. *Partial Least Square Dengan Metode Analisis Soft Modeling*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hasan. 2015. *Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)*. Skripsi. Universitas Negeri; Jogjakarta.
- Ibnu Whardana. 2016. *Tentang Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Pada Pemerintah Desa Kabupaten Magelang*. Skripsi. Universitas Negeri; Semarang.
- Imam Ghozali. 2006. *Konsep Teknik Dan Aplikasi Menggunakan Program SMARTPLS 3,0 untuk Penelitian Empiris* : Edisi kedua, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Jogiyanto dan Willy Abdilla. 2009. *Konsep Dan Aplikasi PLS untuk penelitian Empiris*. Edisi pertama: Yogyakarta: BPFE.
- Jonatan Sarwono dan Umi Narimawati. 2014. *Membuat Skripsi, Tesis, dan disertai Partial Least Square*: Edisi pertama, Yoyakarta: Penerbit Andi.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (diakses melalui <http://kbbi.web.id/>).
- Mashun. 2015. *Tentang Teknik Pengumpulan Data*. Skripsi: Universitas Majapahit.
- Mirfan Zaeland. 2016. "Analisis Yudiris Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa". Universitas Halu Oleo. Kendari
- Nurcholis. 2011. *Tentang unsur pembantu kepala desa atau unsur kewilayahan*.
- Paulus Insap Santosa. 2018. *Metode Kuantitatif Pengembangan*

- Hipotesis dan Pengujiannya Menggunakan SMARTPLS. Edisi pertama*, Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Peraturan Pemerintah No 47 Tahun 2015 tentang perubahan atas PP No. 43 tahun 2014. *Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Vb*
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014. *Tentang pengelolaan Keuangan Desa.*
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018. *Tentang Desa.*
- R. Bintaro. 2016. *Penyelenggaraan Pemerintah desa.* Skripsi. Universitas Jogjakarta.
- Ridwan. 2004. *Teknik Analisis Deskriptif.* Bandung: CV Alfabeta.
- Saibatul. 2020. *Tentang Pengaruh Transparansi Anggaran Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Kualitas Pengelolaan Keuangan Desa.* Skripsi: Universitas erlangga.
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Dan Teknik Analisis Menggunakan SEM.* Bandung: PT Alfabet.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Bisnis.* Bandung: CV Alfabeta.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kuantitatif dan R&D.* Bandung: PT Alfabet.
- Sujarweni, V. Wiratna. 2014. *Metodologi Penelitian.* Yogyakarta: PT. Pustaka Baru.
- Udik Jatmiko. 2019. *Tentang Factor Penghambat Akuntabilitas Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Pegelolaan Keuangan Desa.* Skripsi: Universitas Islami Kediri
- Undang- Undang No 32 Tahun 2004. *Tentang Pemerintahan Daerah.*
- Undang-Undang No 6 Tahun 2014. *Tentang Desa.*
- V Wiratna. 2015. *Tentang Pemerintah Desa Menyusun Perencanaan Pembangunan.* Skripsi: Universitas Universitas Islami Kediri
- Wiyono. 2011. *Tentang Merancang SMARTPLS 3.0.* Yogyakarta: Andi